

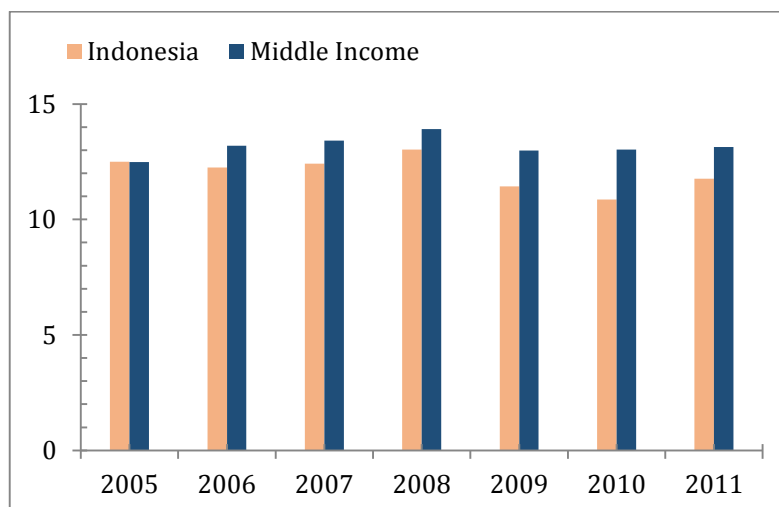
Analisis Penerimaan Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian, Konstruksi, dan Jasa-Jasa

Rasio PPh dan PPN terhadap PDB (*tax ratio*) terus mengalami penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2011 dengan sektor pertanian, konstruksi, dan jasa sebagai sektor-sektor dengan *tax ratio* terendah. Lebih lanjut, Baik Sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa selalu menunjukkan tren yang sama selama tiga tahun terakhir (2011-2013) dimana nilai PDB yang relatif tinggi dan penerimaan perpajakan yang rendah. Sektor konstruksi masih menempati peringkat teratas di antara sektor pertanian ataupun jasa-jasa dalam hal rata-rata penerimaan pajak PPN dan PPh dari tahun 2009 hingga 2013. Namun, ketiga sektor menunjukkan pola yang berbeda dalam hal rasio penerimaan pajak PPh dan PPN terhadap PDB masing-masing sektor (*tax to GDP ratio*) dan tampak ketiga sektor mengalami tren penurunan *tax ratio* dari tahun 2012-2013. Temuan empiris yang dicapai dalam studi ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara PDB yang dihasilkan dari sektor-sektor yang dianalisis terhadap penerimaan perpajakan (PPN dan PPh). Oleh karenanya, strategi optimalisasi penerimaan perpajakan sektoral di Indonesia tidak hanya dapat mempertimbangkan aspek subjek, objek, maupun tarif. Hubungan antara PDB dan kinerja penerimaan pajak nyatanya dapat menjadi langkah awal dalam menentukan strategi pengelolaan penerimaan pajak nasional.

Pengantar

Meskipun Indonesia tergolong ke dalam kelompok ekonomi berpendapatan menengah (*middle income country*), pendapatan pajak Indonesia (% of GDP) masih berada jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah (grafik 1). Lebih dari itu, temuan empiris (Gupta, 2007) yang menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih bergantung pada pajak atas barang dan jasa nyatanya memiliki kinerja pendapatan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang bergantung lebih kepada pajak pendapatan, profit, dan *capital gains* sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh kinerja perpajakan di Indonesia (tabel 1).

Grafik 1. Selepas tahun 2005, pendapatan perpajakan di Indonesia (% GDP) selalu berada di bawah rata-rata negara-negara *middle income countries*. Selama 20 tahun terakhir, nilai tertinggi hanya pernah dicapai pada tahun 1997 (16%).



Sumber: IMF, World Bank, dan Proyeksi data OECD.

Tabel 1. Penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh pajak barang dan jasa (PPN dan PPn BM) dibandingkan pajak pendapatan, profit, dan *capital gains* (PPh).

No	Jenis Pajak	2009*	2011*	2013*
1.	PPN dan PPnBM Dalam Negeri	126,524,80	165,218.96	237,816.23
2.	PPh Ps 25/29 badan	120,312.76	154,609.56	151,910.10
3.	PPh Ps 25/29 Orang Pribadi	3,346.80	3,287.02	4,379.53

***Dalam miliar rupiah**

Identifikasi terhadap masalah tersebut memicu pertanyaan dan analisa lebih lanjut mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan kinerja perpajakan di Indonesia seolah tidak menunjukkan perbaikan, apakah murni karena struktur perekonomian di dalam negeri, atau lebih disebabkan oleh aspek administrasi perpajakan yang harus dibenahi secara berkesinambungan. Studi ini akan lebih berfokus untuk menyoroti bagaimana struktur yang terdapat dalam perekonomian dalam negeri bisa mempengaruhi kinerja perpajakan nasional. Lebih khusus, analisis akan lebih menyentuh kaitan antara produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah sektor perekonomian terhadap penerimaan perpajakan yang bersumber dari sektor terkait.

Ringkasan Eksekutif

A. Mengapa fokus pada penerimaan perpajakan dari sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa?

Rasio PPh dan PPN terhadap PDB (tax ratio) terus mengalami penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2011 dengan sektor pertanian, konstruksi, dan jasa sebagai sektor-sektor dengan tax ratio terendah (Kemenkeu, 2014). Lebih lanjut, Baik Sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa selalu menunjukkan tren yang sama selama tiga tahun terakhir (2011-2013) dimana nilai PDB yang relatif tinggi dan penerimaan perpajakan yang rendah. Jauh berbeda dengan sektor lain (PDB tinggi yang diiringi dengan tingginya penerimaan pajak, atau sebaliknya).

B. Bagaimana potret sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa dalam perekonomian nasional?

Kontribusi sektor pertanian, konstruksi, maupun jasa-jasa di dalam PDB riil secara konsisten sejak tahun 2007 hingga 2014 berada di atas kisaran 25%. Dari aspek ketenagakerjaan, selama 2000 hingga 2012, lebih dari 35% jumlah tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor pertanian. Secara parsial, sektor konstruksi terus mengalami gejala perlambatan pertumbuhan ditengah semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Sementara itu, Kontribusi jasa swasta terus meninggalkan jasa pemerintahan sejak tahun 2007 dengan tren yang terus meningkat.

C. Bagaimana kinerja penerimaan perpajakan dari sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa di dalam struktur penerimaan perpajakan nasional?

Sektor konstruksi masih menempati peringkat teratas di antara sektor pertanian ataupun jasa-jasa dalam hal rata-rata penerimaan pajak PPN dan PPh dari tahun 2009 hingga 2013. Namun, ketiga sektor menunjukkan pola yang berbeda dalam hal rasio penerimaan pajak PPh dan PPN terhadap PDB masing-masing sektor (tax to GDP ratio) dan tampak ketiga sektor mengalami tren penurunan tax ratio dari tahun 2012-2013.

D. Apa temuan empiris yang diperoleh dalam studi ini?

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari Q1 2008 hingga Q4 2012, terdapat korelasi positif di antara PDB dengan pendapatan pemerintah (PPN dan PPh) dari sektor yang dianalisis. Meskipun begitu, analisis korelasi belum cukup untuk dapat menentukan variabel mana yang berperan sebagai variabel yang mampu mempengaruhi variabel lain.

Secara umum dan parsial, dari nilai koefisiennya, terungkap bahwa terdapat hubungan yang terkadang dapat searah namun dapat juga berkebalikan arah dalam hal elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB masing-masing sektor. Hubungan searah mengindikasikan bahwa kenaikan (penurunan) PDB akan meningkatkan (menurunkan) penerimaan pajak (PPh+PPN). Sedangkan, hubungan berbalik arah mengindikasikan bahwa kenaikan (penurunan) PDB akan menurunkan (meningkatkan) penerimaan pajak (PPh&PPN). Hasil temuan juga menunjukkan besaran elastisitas yang beragam.